



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD ROFI'UDDIN
2. Jabatan : REKTOR
3. NHK : 92758

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 5.928.000.000

1. Tanah Seluas 30000 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 9770 m2 di KAB / KOTA JOMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 338 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 830 m2/360 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 960.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 329 m2/329 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.543.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 335 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 875.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 3.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.488.603.019**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 7.427.103.019



III. HUTANG

Rp. 400.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 7.027.103.019

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.